

ABSTRAK

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di pemerintahan Kota Bandung tahun 2017 masih berjalan belum optimal. Beberapa permasalahan ditemukan dalam realisasi keterbukaan informasi publik ditemukan pada saat observasi awal, diantaranya kurangnya dukungan pemerintah dalam penyediaan anggaran serta minimnya partisipasi masyarakat dalam permohonan informasi kepada PPID Utama. Kondisi ini di duga minimnya pemerintah dalam melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran pelaksanaan keterbukaan informasi publik di pemerintahan kota bandung. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang, terdiri dari para pelaksana kebijakan, pengawas kebijakan, dan masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak kebijakannya. Teknik analisis data yang di gunakan adalah analisis menurut Miles Dan Huberman yang meliputi reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan, pelaksanaan keterbukaan informasi publik di pemerintahan Kota Bandung dilihat dari aspek ukuran dan standar kebijakan, keadaan sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/ kecenderungan para pelaksana, dimensi komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas pelaksana, ekonomi, sosial, dan Politik, masih terdapat kelemahan sehingga menimbulkan kendala. Adanya keterbatasan anggaran, kurangnya prasarana penunjang, dan pengsosialisasian kepada masyarakat menyebabkan beberapa kendala dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi publik,

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pelaksanaan keterbukaan informasi publik di pemerintahan kota bandung tahun 2017 belum optimal dan masih harus dilakukan peningkatan. Saran yang bisa disampaikan peneliti yakni perlunya peningkatan anggaran, pemenuhan prasarana, dan pengsosialisasian kepada masyarakat.

Kata kunci : Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, Kebijakan

ABSTRACT

The implementation of public information openness in the city of Bandung in 2017 is still not optimal. Several problems found in the realization of public information openness were found during initial by observations, including lack of government support in the provision of budget and the lack of public participation in requests for information from the Main PPID. This condition is assumed to be the lack of the government in disseminating public information opening to the public.

The purpose of this study was to find out the imagination of the implementation of public information openness in the government of the city of Bandung. The research method was used qualitative research with descriptive approach. Data collection techniques that researchers use are field studies and library studies which include interviews, observations, and documentation. Informants in this study amounted to 6 people, consisting of policy implementers, policy supervisors, and the public as parties who feel the impact of their policies. The data analysis technique used is an analysis according to Miles Dan Huberman which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The result of research showed that the implementation of public information openness in the city government of Bandung was seen from the aspect of size and standard policy, condition of resources, characteristics of implementing agents, attitudes or tendencies of the implementer, dimensions of communication between Organizations and implementation, economic, social, and Political Activities, still there are weaknesses that cause obstacles. The existence of limited budgets, lack of supporting infrastructure, and socialization to the community led to several obstacles in the implementation of public information openness.

The conclusion of this research is, the implementation of public information openness in the government of the city of Bandung in 2017 has not been optimal and still has to be improved. Suggestions that can be conveyed by researchers are needed to increase budgets, fulfill infrastructure, and socialize to the community.

KeyWord : *Public Information Openness Policy, Policy.*